



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU  
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305  
WEBSITE : <https://www.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

NOMOR: 5530/Kpts./HM.130/A/12/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI**

**PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses oleh publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut hasil penyelenggaraan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon 1 sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Peringkat
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	I
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	II
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	III
4	Direktorat Jenderal Perkebunan	IV
5	Inspektorat Jenderal	V
6	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	VI
7	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	VII
8	Direktorat Jenderal Hortikultura	VIII

KEDUA : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon II sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Peringkat
1	Balai Besar Veteriner Farma Surabaya	I
2	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	II
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	III
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang	IV
5	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	V
6	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	VI

7	Balai Besar Veteriner Denpasar	VII
8	Balai Besar Veteriner Wates	VIII
9	Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	IX
10	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	X
11	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	XI
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	XII
13	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	XIII
14	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	XIV
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	XV
16	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	XVI
17	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	XVII
18	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur	XVIII
19	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	XIX
20	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	XX
21	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	XXI
22	Balai Besar Veteriner Maros	XXII
23	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	XXIII
24	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	XXIV
25	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	XXV

26	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	XXVI
27	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	XXVII
28	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	XXVIII
29	Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	XXIX

KETIGA : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon III sebagai berikut:

No	Unit Eselon III	Peringkat
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	I
2	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	II
3	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	III
4	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	IV
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	V
6	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	VI
7	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	VII
8	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	VIII
9	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	IX
10	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta	X

11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	XI
12	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	XII
13	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	XIII
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	XIV
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	XV
16	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	XVI
17	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	XVII
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	XVIII
19	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	XIX
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	XX
21	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	XXI
22	Balai Embrio Ternak	XXII
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	XXIII
24	Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak	XXIV
25	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	XXV
26	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	XXVI
27	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	XXVII
28	Balai Veteriner Bukittinggi	XXVIII
29	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	XXIX

30	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	XXX
31	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	XXXI
32	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	XXXII
33	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	XXXIII
34	Balai Veteriner Banjarbaru	XXXIV
35	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas	XXXV
36	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	XXXVI
37	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	XXXVII
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	XXXVIII
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	XXXIX
40	Balai Veteriner Lampung	XL
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	XLI
42	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	XLII
43	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	XLIII
44	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	XLIV
45	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	XLV
46	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	XLVI
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	XLVII

48	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	XLVIII
49	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	XLIX
50	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	L
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	LI
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	LII
53	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	LIII
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	LIV
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	LV
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	LVI
57	Balai Inseminasi Buatan Lembang	LVII
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	LVIII
59	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	LIX
60	Balai Veteriner Medan	LX
61	Balai Veteriner Subang	LXI

KEEMPAT : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Petugas PPID Terbaik sebagai berikut:

No	Nama	Unit Kerja	Peringkat
1	Deibei Saphira	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	I
2	I Putu Sudarma Adi Septyanto	Balai Besar Veteriner Maros	II
3	Arifa Nofriyaldi Chan	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	III
4	Nandy Mardiansyah	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	IV
5	Fajar Adi Swastika	Inspektorat Jenderal	V
6	Aji Ispatrika	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	VI
7	Krislenika Higita	Balai Inseminasi Buatan Lembang	VII
8	Nadif Ilmiah	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	VIII
9	Muh. Mutahajid Almanar M	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	IX
10	Laelatul Qodaryani	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	X

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 03 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan PPID Utama

Kementerian Pertanian



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Yang bersangkutan.